



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217  
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : [inspektorat@lamongankab.go.id](mailto:inspektorat@lamongankab.go.id)  
Web site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, Agustus 2024

nomor  
it  
inspirasi  
ihai

700/ /LHP/413.201/2024  
Segera

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di

LAMONGAN

Laporan Hasil Reviu Manajemen  
Risiko Bagian Tata Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lamongan Semester I Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah, kami telah melakukan Reviu pengelolaan risiko pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413. 013/2023 tentang pembentukan struktur pengelola risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

## A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/ proses bisnis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemda

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/ Perjanjian Kinerja

(Perkin) unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/Perkin unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Simpulan:

Dari hasil Reviu penetapan konteks Risiko Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, identitas dan periode telah sesuai dengan tahun berjalan dan telah sesuai dengan ruang lingkup, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis sesuai dengan Formulir Penetapan Konteks.

#### **B. Reviu Identifikasi Risiko**

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat.
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sastra yang ada di dokumen Renstra/Perkin. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Simpulan:

Identifikasi Risiko Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah telah mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.

#### **C. Reviu Analisis Risiko**

Menilai akurasi level risiko unit kerja; besaran skala dampak dan kemungkinan

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria



kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.

4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.
5. Telah dibuat Kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan risk register.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

**Simpulan:**

Dari hasil Reviu Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Analisis Risiko untuk menilai akurasi level risiko unit kerja; besaran skala dampak dan kemungkinan telah dilakukan dengan berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, namun jumlah responden analisa risiko masih 2 responden.

Disarankan agar menambah jumlah responden minimal 30% dari jumlah pegawai dan wewakili seluruh bidang/urusan.

#### **D. Reviu Evaluasi Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja; (Notulen Rapat FGD).
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik; (Form Evaluasi)

**Simpulan:**

Dari hasil Reviu Evaluasi Risiko pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah disimpulkan bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko.

#### **E. Reviu Respon Risiko**

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Dapatkan daftar risiko prioritas, dan rencana tindak pengendalian.
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas.
3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya.
4. Cek kertas kerja RTP. Pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Simpulan:

Dari hasil Reviu Respon Risiko dapat disimpulkan bahwa Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya, penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.

#### **F. Reviu Informasi dan Komunikasi**

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja

1. Menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Simpulan:

Dari hasil reviu Informasi dan komunikasi disimpulkan bahwa seluruh RTP telah diinformasikan sesuai jadwal.

#### **G. Reviu Pemantauan**

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai.

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan s.d. triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal



4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Simpulan:

Hasil revidu pemantauan menunjukkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai dan kejadian telah tercatat.

Demikian kami sampaikan hasil Revidu Manajemen Risiko Semester I 2024 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR  
KABUPATEN LAMONGAN

  
A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

...  
r. Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
kretariat Daerah;  
sip